

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers. Jakarta
- . 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- . 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta
- A.Patra M. Zen. 2021. *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Artidjo Alkostar. 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*. PUSHAM UII, Yogyakarta
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Penerbit Jambatan. Jakarta
- . 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- . 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Jakarta

- Evi Hartati, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan
- Gurnar Myrdal. 2006. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Utama. Bandung. Cetakan ke-2
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang
- Kadarudin. 2020. *Asset Recovery Hasil Kejahatan Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Kerjasama Internasional*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Hukum Pidana Buku 1*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta
- Marwan Effendy. 2012. *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Referensi. Jakarta
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor*. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta

- P.A.F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta
- . 2017, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. Cetakan Ke-13
- P. L. Wery. 1990. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Percetakan Negara. Jakarta
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Setara Press. Malang
- R. Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha. Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta

Yunus Husein. 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Pustaka Juanda Tigalima. Jakarta

JURNAL

Farid R. Faqih. 2002. *Mendulang Rente di Lingkar Istana*. Jurnal Ilmu Soisal Transformatif. *Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*. Edisi 14.

Fence M. Wantu. 2013. *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum. Volume 25, Nomor 2. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Luhut MP Pangaribuan. 2004. *Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, LeIP. Edisi 2

Muhamad Nur Ibrahim, 2016, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi*, Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5.

SKRIPSI

Farros Al Aziz. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Didalam Penyitaan Untuk Memperoleh Kembali Barang Miliknya Terhadap Harta Yang Bukan Hasil Tindak Pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Muhammad Yusuf Abustam. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Melalui Permainan Kasino (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid.Sus Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Widyanti Wibowo. 2019. *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Rizki Dwi Nugroho. 2021. *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif*. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

WEBSITE

Faisal Javier. 2021. *ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya*. Majalah Tempo. diakses 3 Oktober 2022, <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>